

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Istilah pertumbuhan ekonomi sering digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi, dan perubahan fundamental ekonomi jangka panjang suatu negara. Setiap Negara akan selalu berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan berkesinambungan. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat karena pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam suatu negara. Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah suatu proses perbaikan yang berkesinambungan dari suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik. Proses pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dalam upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian, Sistem ekonomi di Indonesia memiliki acuan yang jelas yaitu UUD 1945, yaitu sistem ekonomi Pancasila, yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Dalam demokrasi ekonomi ini melibatkan pemerintah, pengusaha swasta, dan seluruh rakyat, sehingga dalam pelaksanaannya harus ada kerja sama antara pemerintah, rakyat dan swasta. Sistem ekonomi Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 33. Berdasarkan bunyi dari tiga ayat pasal 33 UUD 1945 pemerintah sangat berperan menunjang sistem ekonomi yang berbasis pada kegiatan ekonomi kerakyatan, artinya harus ada kesinambungan antara peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian di Indonesia.

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pada prinsipnya, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai pertambahan pendapatan nasional

atau penambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi selama satu tahun. Dari sini jelas bahwa indikator pertumbuhan ekonomi salah satunya ditunjukkan oleh nilai PDB (Produk Domestik Bruto). PDB merepresentasikan pendapatan nasional riil yang dihitung dari keseluruhan output dari barang dan jasa yang diproduksi suatu negara. Syarat bagi suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila nilai PDB atau pendapatan nasional riil mengalami kenaikan dari periode sebelumnya. PDB dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara atau sebagai cerminan keberhasilan suatu pemerintahan dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi (Buana, 2018). PDB disajikan dalam dua konsep harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari PDB atas harga konstan. PDB atas dasar harga konstan, sering disebut dengan PDB riil, yang merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDB atas dasar harga konstan memperlihatkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai acuan yang diperoleh dalam pembangunan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam proses pembangunan, perekonomian juga dapat dikaji melalui peran pemerintah yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat pemerintah daerah. Pada struktur APBN dan APBD terdapat sisi penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Penerimaan dan Pengeluaran pemerintah akan memberikan dampak terhadap upaya pembangunan perekonomian, keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi daerah terutama terkait dengan kontribusi

keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Besarnya kontribusi pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian daerah.

Berdasarkan statistik keuangan provinsi di Indonesia yang menggambarkan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama 1 periode anggaran. Realisasi pendapatan mengalami kenaikan setiap tahunnya, total pendapatan 242,71 triliun pada tahun 2015, 275,57 triliun rupiah pada tahun 2016; 323,49 triliun rupiah pada tahun 2017; dan 335,59 triliun rupiah pada tahun 2018 atau mengalami pertumbuhan sebesar 13,54 persen pada tahun 2016, 17,39 persen pada tahun 2017 dan 3,74 persen pada tahun 2018. Peningkatan pendapatan ini salah satunya didukung oleh meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. Selama periode tahun 2015-2018, PAD terus mengalami kenaikan, yaitu dari 127,50 triliun pada tahun 2015, 133,18 triliun rupiah pada tahun 2016, 149,31 triliun rupiah pada tahun 2017 dan 158,72 triliun pada tahun 2018. Kontribusi PAD terhadap pendapatan pemerintah provinsi pada tahun 2015 hingga 2018 berkisar antara 40 hingga 60 persen, ini artinya PAD menjadi salah satu sumber pendapatan yang memiliki kontribusi besar untuk pendapatan daerah. Selain realisasi pendapatan, terdapat pula realisasi belanja. Secara umum realisasi belanja daerah pada kurun waktu 2015-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari 247,05 triliun pada tahun 2015, 264,10 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi 307,04 triliun rupiah tahun 2017, dan 326,43 triliun rupiah pada tahun 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh hampir seluruh jenis belanja, baik pada bagian belanja tidak langsung maupun pada bagian belanja langsung.

Penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan. Selain penerimaan dan pengeluaran pemerintah, instrumen penting lain untuk menggerakkan perekonomian adalah investasi. Menurut

Mulyadi (2001: 284) Investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang”. Dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana dan penundaan konsumsi selama periode waktu tertentu untuk mendapatkan sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Banyak faktor yang menyebabkan Indonesia selalu menarik minat investor asing untuk berinvestasi. Selain jumlah penduduk yang tinggi, kekayaan sumber daya alam seperti tambang, hutan, dan laut menjadi incaran investor. Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 250.000.000 jiwa merupakan pasar yang besar bagi investor. Kegiatan investasi dapat mendorong kegiatan ekonomi suatu negara, meningkatkan output yang dihasilkan, menyerap tenaga kerja dan menambah devisa bagi negara. Oleh karena itu pemerintah selalu berusaha menciptakan iklim yang sehat dan meningkatkan keamanan di dalam negeri agar dapat menarik orang atau negara lain untuk berinvestasi. Indonesia perlu mewaspadaai sejumlah faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi salah satunya yaitu masih minimnya investasi swasta. Indonesia juga membutuhkan peran investasi swasta yang kuat dan reformasi kebijakan yang komprehensif untuk pertumbuhan yang lebih baik. Oleh karenanya Dalam rangka meningkatkan investasi, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) mengeluarkan 2 peraturan baru untuk mempercepat dan pelaksanaan berusaha yaitu peraturan BKPM No. 13 tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara perijinan dan fasilitas penanaman modal. Peraturan BKPM No. 14 tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Investasi swasta ini terdiri dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Penanaman modal dalam negeri merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Menurut Rostow dalam Todaro (2010) proses pertumbuhan ekonomi suatu negara harus bertumpu pada kemampuan dalam negeri, sementara sumber daya luar

seharusnya hanya bersifat membantu kekuatan dalam negeri. PMDN sebagai sumber domestik merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional. Di satu pihak mencerminkan permintaan efektif dan dilain pihak menciptakan efisiensi produktif bagi produksi dimasa depan. Proses penanaman modal ini menghasilkan kenaikan output nasional dalam berbagai cara. Penanaman modal dalam negeri ini pula yang akan membawa kearah kemajuan teknologi. BKPM mencatat, kinerja perekonomian Indonesia dalam 4 tahun terakhir menunjukkan peningkatan, dimana investasi domestik yang terealisasi sepanjang tahun 2016 mencapai Rp 216,23 triliun terjadi kenaikan 20,46 persen dibanding tahun 2015 yang baru mencapai 179,5 triliun, begitu juga ditahun 2017 yang mencapai Rp 262,35 triliun dimana terjadi kenaikan 21,33 persen dibanding tahun 2016 yang baru mencapai Rp 216,23 triliun. Peningkatan nilai investasi domestik juga diikuti dengan meningkatnya jumlah proyek yang menyerap nilai investasi tersebut, jumlah proyek yang terserap meningkat dari 5.100 proyek pada tahun 2015 menjadi 7.511 proyek pada tahun 2016, suatu peningkatan yang sangat signifikan sekali (47,27 persen), begitu juga ditahun berikutnya, jumlah proyek yang terserap meningkat dari 7.511 proyek pada tahun 2016 naik menjadi 8.838 proyek pada tahun 2017 atau meningkat sebesar (17,67 persen). Jumlah investasi yang dialirkan oleh masyarakat ataupun perusahaan domestik sepanjang tahun 2018 mencapai Rp 328,35 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 25,25 persen. Begitupula dengan jumlah proyek yang mampu menyerap nilai investasi di tahun 2018 juga mengalami peningkatan sebesar 22,37 persen menjadi 10.815 proyek. penanaman modal dalam negeri akan menjadi instrumen penting bagi perkembangan perekonomian.

Selain penanaman modal dalam negeri terdapat juga Penanaman modal asing, penanaman modal asing merupakan langkah awal penggerak kegiatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. investasi asing yang masuk ke Indonesia dalam bentuk penanaman modal dapat bersifat positif dan negatif bagi pembangunan. Investasi akan bersifat positif jika investasi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu dapat menggerakkan atau

meningkatkan sektor-sektor yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, investasi asing dapat bersifat negatif apabila terjadi penambahan/peningkatan permintaan konsumsi, dalam bentuk peningkatan impor, dimana pertumbuhan impor lebih pesat daripada pertumbuhan ekspor yang disebabkan oleh adanya PMA, maka akan terjadi defisit neraca perdagangan. Perkembangan investasi asing yang masuk ke Indonesia menunjukkan pergerakan yang berfluktuatif setiap tahunnya. Investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia pada tahun 2016 tercatat sebanyak US\$ 28,96 miliar yang tersebar di 25.321 proyek. Nilai investasi asing ini lebih rendah atau turun sebesar 1,06 persen jika dibanding dengan tahun 2015 yang mencapai US\$ 29,27 miliar dan tersebar di 17.738 proyek. Ditahun 2017 investasi asing yang masuk ke Indonesia kembali mengalami peningkatan sebesar 11,31 persen, yaitu mencapai US\$ 32,24 miliar dan tersebar di 26.257 proyek. Pada tahun 2018 investasi asing yang masuk di Indonesia mengalami penurunan nilai investasi menjadi US\$ 29,31 miliar atau turun sekitar 9,69 persen, demikian pula dengan jumlah proyek mengalami penurunan sebesar 16,32 persen yaitu dari 26.257 proyek pada tahun 2017 menurun menjadi 21.972 proyek pada tahun 2018. Penanaman modal asing ini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian.

Penanaman modal baik dalam negeri maupun asing merupakan langkah awal kegiatan produksi. Karena dengan adanya modal semua kegiatan dapat terealisasi dengan baik dan lancar. Dengan posisi semacam itu, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dalam kurun waktu empat tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, tercatat tahun 2018 merupakan pertumbuhan terbaik dalam 4 tahun terakhir yaitu 5,17 % dibanding tahun 2017, 5,07%, tahun 2016, 5,03 % dan tahun 2015, 4,79 persen, namun demikian, kondisi perekonomian yang lebih baik ini memicu kontroversi, karena pemerintah sebelumnya menargetkan pertumbuhan ekonomi indonesia di tahun 2018 sebesar 5,4 % direvisi menjadi 5,2 %. Sedangkan angka pertumbuhan ekonomi yang dicapai masih dibawah target awal, bahkan masih dibawah pula target revisi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 mencapai 5,17%, meski lebih tinggi, Ekonom Center of Reform on Economics (Core), Pieter Abdullah menilai, pencapaian tersebut masih di bawah potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia, apalagi, pemerintah telah menerapkan target pertumbuhan ekonomi di tahun ini sebesar 5,4%. Menurut Pieter, lambatnya pertumbuhan ekonomi tak boleh hanya dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi global yang juga tengah melambat serta turunnya harga komoditas. Karena itu, menurut Pieter, pemerintah perlu mendorong permintaan di dalam negeri. Pasalnya, bila konsumsi rumah tangga rendah dan permintaan domestik rendah maka investasi juga akan relatif tidak tinggi. Pieter menambahkan, bila pemerintah tak mengambil sebuah kebijakan atau terobosan yang signifikan baik di sektor riil maupun di sektor keuangan pendapatan dan belanja maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stagnan di sekitar 5%.

Penelitian mengenai determinan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia sudah dilakukan oleh banyak peneliti. Salah satunya penelitian yang dilakukan Aisyah Wulandari (2020) yang menunjukkan pendapatan asli daerah, penanaman modal dalam negeri, dan penanaman modal asing berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel belanja daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menurut Siti Aminah (2016) yang menunjukkan Investasi swasta dan pengeluaran pemerintah (belanja daerah) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut dilaksanakan pada satu kota tertentu saja, pada penelitian ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian pada tiap Provinsi di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Determinan Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pendapatan asli daerah, belanja daerah, penanaman modal dalam negeri, dan penanaman modal asing berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia?
2. Apakah pendapatan asli daerah, belanja daerah, penanaman modal dalam negeri, dan penanaman modal asing berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia?

### **1.3. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, perlu dibatasi ruang lingkup pembahasannya sehingga penulisan skripsi ini dapat dilakukan secara lebih terarah dan dapat mencapai tujuan serta sesuai dengan permasalahan yang ada. Dari data yang diperoleh, maka pembahasan dibatasi pada analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja daerah pada laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia tahun 2015-2018 serta analisis pengaruh investasi swasta yang terdiri dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing pada data yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS).

### **1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah penanaman modal dalam negeri berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia.
4. Untuk mengetahui apakah penanaman modal asing berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia.



5. Untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah, belanja daerah, penanaman modal dalam negeri, dan penanaman modal asing berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dikarenakan memiliki manfaat yaitu :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pendapatan asli daerah, belanja daerah, penanaman modal dalam negeri, dan penanaman modal asing berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia dan juga sebagai masukan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kedepannya.

2. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis berkaitan dengan penelitian.

3. Bagi Akademisi

Memperkaya penelitian-penelitian sejenis yang telah ada yang dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian-penelitian berikutnya.

